
Evaluasi Program Bantuan Operasional Sekolah Di Sekolah Dasar Negeri 004 Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan

Dewi Ayu Pratiwi¹, Imam Muazansyah²

E-mail dewiayupratiwi03@gmail.com¹, alyacarp@gmail.com²

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Kaltara

Abstract

This study aims to evaluate the School Operational Grant Program (BOS) at SD Negeri 004 Tanjung Palas by using a descriptive qualitative research approach method, namely the researcher tries to explain the real picture related to the evaluation of the school operational assistance program (boss) at SD Negeri 004 Tanjung Palas. To obtain comprehensive data, observation, documentation, and in-depth interviews were conducted with informants as primary data sources. and secondary data, including processed data or officially, published data obtained from media news, literature, previous research articles, documentation, and archives of BOS funds in this study. Analysis of the research data, namely: data reduction, data presentation, and concluding/verification. The results of the study can be described that the use of School Operational Grant funds at SD Negeri 004 Tanjung Palas cannot be categorized as good as can be seen specifically in the indicators of program evaluation criteria used, namely effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. In this case, two indicators have not been assessed for optimal implementation, namely in terms of effectiveness because schools do not prioritize student needs while focusing more on school support equipment, and in terms of equity, it cannot be said to be good because the provision of learning needs, namely text books cannot be felt by all students and must complement independently. This is an evaluation material for the school. Reporting on the use of BOS funds at the 004 Tanjung Palas Public Elementary School has been running well and based on the prescribed standard procedures, and also the monitoring process of the use of BOS funds in SD Negeri 004 Tanjung Palas so far can be categorized as good. Because the supervision uses a mechanism that applies and can involve many parties so that the results can be accounted for.

Keywords: Program Evaluation, School Operational Grant Program (BOS), SD Negeri 004 Tanjung Palas

PENDAHULUAN

Sistem Pendidikan Nasional diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar yang dikenal dengan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dimulai sejak berusia 7 hingga 15 tahun. Setiap negara mempunyai kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsanya tanpa terkecuali, Pemerintah Indonesia mengamatkan setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan untuk mengembangkan potensi yang

dimiliki secara optimal yang sesuai Pasal 31 ayat (1) dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pendidikan bermutu yang menghasilkan lulusan sesuai harapan masyarakat yang memiliki moral, kualitas diri, pengetahuan maupun kompetensi dikemudian hari.

Peraturan Mendiknas Nomor 69 Tahun 2009 menjelaskan tentang standar biaya operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar

satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan. BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

Program BOS merupakan salah satu implementasi kebijakan publik yang tertuang dari Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 34 ayat 2 menyebutkan terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah menjamin tanpa memungut biaya, dan tugas sekolah untuk menunjang penyediaan sarana dan prasarana dalam mengefektifkan proses kegiatan belajar mengajar dan meningkatkan prestasi belajar peserta didik.

BOS mulai diterapkan sejak Juli 2005 dengan sasaran seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya digunakan untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan wajib belajar 9 tahun. Wajib belajar 9 tahun bertujuan untuk memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia agar dapat mengembangkan potensi dirinya sehingga dapat hidup mandiri dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu, serta mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal (SPM), dan pencapaian standar nasional (PSN) pada satuan pendidikan yang sudah memenuhi SPM, serta mewujudkan layanan pendidikan menengah yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat.

Pelaksanaan BOS ternyata aktualnya masih belum menjangkau keseluruhan peserta didik yang memiliki status hidup yang miskin atau tidak mampu dalam memperoleh layanan pendidikan secara layak dan memadai. Dampak BOS ternyata dapat memperkuat kemampuan

lembaga pendidikan yakni sekolah dalam memberikan materi pembelajaran dan kegiatan tambahan kepada siswa. Beberapa komponen yang semula dibebankan orang tua siswa melalui SPP menjadi berkurang, adanya peningkatan kuantitas dan kualitas sarana pendidikan, beban biaya sekolah menjadi lebih berkurang, dapat dirasakan masyarakat akan dapat mengurangi anak putus sekolah.

Hambatan pelaksanaan BOS, meliputi sering terlambat pencairan dana BOS sehingga mengganggu kegiatan proses belajar mengajar di sekolah. Tujuan pemanfaatn dana BOS hendaknya untuk operasional sekolah yang menunjang kelancaran proses belajar, sumber dana sekolah berasal dari APBD, BOS dan Sumbangan orang tua siswa, ketiga komponen ternyata sumbangan orang tua murid paling dominan.

Keberadaan dana BOS tetap dipertahankan sehingga jumlah anggaran perlu ditingkatkan dan realisasi pencairan dana BOS yang dilakukan tiap triwulan dan pencairannya diawal bulan harus dapat terwujud, Sasaran BOS tercapai secara efektif dengan memberikan akses bagi siswa keluarga miskin maupun siswa keluarga tidak mampu memperoleh pendidikan dasar yang bermutu, sudah seharusnya untuk melakukan seleksi secara transparan bagi siswa miskin/tidak mampu dengan membentuk tim kecil yang melakukan tugas melakukan pengecekan kondisi siswa yang sebenarnya di lapangan disamping berdasarkan surat keterangan dari Kepala Kelurahan.

Provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi termuda dengan urutan ke-34 dari di Indonesia dan masyarakatnya sudah tergolong maju dalam mementingkan pendidikan dikarenakan segala macam kebutuhan sudah terpenuhi dan tersedia selain daerah yang maju paradigma masyarakat terkait bagaimana pentingnya pendidikan dan besarnya pengaruh pendidikan bagi generasi penerus bangsa sudah seimbang terlebih bantuan-bantuan demi menunjang kegiatan dan fasilitas pendidikan yang disalurkan dengan maksimal.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Evaluasi Program Bantuan Operasional Sekolah Di SD Negeri 004 Tanjung Palas”

Menurut Samodra Wibawa (1994: 50), kebijakan sebagai suatu sistem yang memiliki tiga buah komponen yang berinteraksi secara timbal balik. Tiga komponen tersebut yaitu pelaku kebijakan, lingkungan kebijakan dan kebijakan publik itu sendiri. Ketiga komponen ini saling mempengaruhi satu sama lain. Komponen-komponen itu dapat dijelaskan secara rinci: 1) Pelaku kebijakan, yakni badan pemerintahan maupun orang atau lembaga nonpemerintah yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Mereka dapat mempengaruhi dan sekaligus terkena pengaruh dari suatu kebijakan. 2) Lingkungan kebijakan, dimaksud dengan lingkungan bukannya orang-orang atau lembaga yang berada di sekitar dan memengaruhi pemerintah selaku penentu akhir suatu kebijakan (mereka ini semua termasuk dalam kotak pelaku/aktor kebijakan) melainkan lebih menunjuk kepada bidang-bidang kehidupan masyarakat yang dapat atau perlu dipengaruhi oleh pelaku kebijakan. 3) Kebijakan publik, yaitu serangkaian pilihan tindakan pemerintah untuk menjawab tantangan (atau memecahkan masalah) kehidupan masyarakat.

Kebijakan negara yang dikemukakan oleh Harol D. Lasswell dan Abraham Kaplan (dalam artikel Muazansyah dan Irsyad; 2020) sebagai *a projected program of goals, values and practices*. Juga sebagai sebuah program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah

Evaluasi program menurut Rossi & Freeman (dalam Samodra Wibawa, 1994: 63) harus dapat menjawab beberapa pertanyaan dalam penelitian evaluasi yaitu: desain dan konseptualisasi program, implementasi program (monitoring dan akuntabilitas) serta kegunaan program (dampak dan efisiensi) dengan menjelaskan tujuan mengevaluasi program adalah peneliti harus menentukan nilai berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Dengan

kata lain, hal yang terpenting dalam membuat evaluasi kebijakan adalah tersedianya tujuan (*goals*) dan kriteria (*criteria*). *Goals* merumuskan sasaran yang hendak dicapai dalam suatu kebijakan, baik dinyatakan dalam global maupun dalam angka-angka. Sedangkan kriteria memastikan bahwa *goals* ditetapkan sebelum itu dapat dicapai dan dipenuhi secara memuaskan.

Pemikiran William Dunn mengenai kriteria evaluasi program/kebijakan (2014 : 282), yakni: 1. Efektivitas, berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil yang diharapkan; 2. Efisiensi berhubungan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas yang dikehendaki; 3. Kecukupan, berkaitan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau peluang dalam kesempatan untuk menumbuhkan adanya masalah; 4. Pemerataan menjelaskan dengan pemerataan distribusi manfaat kebijakan; 5. Responsivitas dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok; dan 6. Ketepatan dengan pertanyaan apakah kebijakan tersebut tepat untuk kebutuhan menyelesaikan permasalahan bagi masyarakat?

Proses penetapan alokasi dana BOS dilaksanakan sebagai berikut: 1. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota melakukan pengumpulan dan verifikasi data jumlah peserta didik tiap sekolah berdasarkan data individu peserta didik dari Dapodik. 2. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota bersamasama dengan Tim Manajemen BOS Provinsi dan Tim Manajemen BOS Pusat melakukan rekonsiliasi data jumlah peserta didik tiap sekolah. 3. Atas dasar jumlah peserta didik tiap sekolah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat alokasi dana BOS tiap Kabupaten/Kota/Provinsi, untuk selanjutnya dikirim ke Kementerian Keuangan. 4. Kementerian Keuangan menetapkan alokasi anggaran tiap provinsi melalui Peraturan Menteri Keuangan setelah Kementerian Keuangan menerima data mengenai jumlah sekolah dan jumlah peserta didik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 5. Alokasi dana BOS tiap Provinsi dalam satu tahun anggaran ditetapkan berdasarkan data jumlah peserta didik tahun

pelajaran yang sedang berjalan ditambah dengan perkiraan pertambahan jumlah peserta didik tahun pelajaran baru. 6. Alokasi dana BOS tiap sekolah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (dalam hal ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan). 7. Alokasi dana BOS setiap sekolah

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian program wajar 9 tahun yang di mulai sejak tahun 2009 dimana pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas.

Program BOS dalam perkembangannya mengalami peningkatan biaya satuan dan juga perubahan mekanisme penyaluran. Sejak tahun 2012 penyaluran dana BOS dilakukan dengan mekanisme transfer ke provinsi yang selanjutnya ditransfer ke rekening sekolah secara online, Melalui mekanisme ini, penyaluran dana BOS ke sekolah berjalan lancar.

Pelaksanaan program BOS diatur dengan 3 peraturan menteri, yaitu:

- a. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 Tentang Rincian APBN Tahun 2015.
- b. Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang mekanisme penyaluran dana BOS dari pusat ke provinsi dan pelaporannya.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mekanisme pengelolaan dana BOS di daerah dan mekanisme penyaluran dari kas daerah ke sekolah.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana BOS.

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Program BOS tidak dibahas

kembali dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian evaluasi dengan pendekatan menggunakan metode deskriptif untuk mendapatkan informasi yang valid dan dapat dipercaya, tentang hasil-hasil kebijakan. Penelitian ini berlokasi di Sekolah Dasar Negeri 004 Tanjung Palas Tengah. Berada di Jalan Bendahara, Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan.

Fokus penelitian ini adalah evaluasi program bantuan operasional sekolah (BOS) di Sekolah Dasar Negeri 004 Tanjung Palas Tengah berupa efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan dan responsivitas.

Data yang diolah penelitian ini adalah data primer, meliputi data yang langsung direkam di lapangan melalui wawancara mendalam dan yang didapat melalui observasi yang dilakukan oleh peneliti sendiri dan data sekunder, meliputi data olahan atau data telah dipublikasikan secara resmi yang didapat dari berita media, website resmi Dinas Pendidikan, literatur, artikel penelitian terdahulu, dokumentasi dan arsip dana BOS terkait lainnya.

Metode pengumpulan data untuk penelitian ini adalah wawancara mendalam (*in depth-interview*) secara tidak berstruktur, meskipun disiapkan pula pedoman wawancara. Kegiatan wawancara dengan para informan dilakukan di tempat yang berbeda-beda, sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Analisis data yang digunakan yaitu: Reduksi Data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Efektifitas

Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah di Sekolah Dasar Negeri 004 Tanjung Palas dari segi efektifitas penggunaan dan

pengelolaan pada dasarnya sudah berjalan dan dalam proses untuk baik dengan tunduk serta patuh pada aturan dan batasan yang dituangkan dalam buku petunjuk teknis yang disusun oleh tim BOS tersebut. Walaupun belum sempurna namun hasil yang ingin dicapai oleh program ini sudah tergambarkan di SD Negeri 004 Tanjung Palas seperti mencoba memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekolah, walaupun masih terdapat beberapa kekurangan dalam proses pelaksanaannya. SD Negeri 004 Tanjung Palas sejak lama menjadi salah satu sekolah yang favorit di Tanjung Palas, sebelum adanya sistem zona murid-murid yang mendaftar ke sekolah ini selalu diatas rata-rata karena dari segi infrastruktur sudah lebih baik dan memadai bagi siswa. Tersalurkan bantuan dari pemerintah melalui Program BOS sangat berpengaruh dalam perkembangan sekolah selama ini.

Pengelolaan pembiayaan pendidikan akan berpengaruh secara langsung terhadap kualitas sekolah, terutama berkaitan dengan sarana prasarana dan sumber belajar. Sehingga diharapkan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah merata dan dapat diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Program Bantuan Operasional Sekolah menjadi salah satu sumber kehidupan bagi sekolah karena bersifat rutin, sekolah diberikan dana untuk menunjang kualitas pembelajaran untuk siswa-siswanya. Penggunaan dana dalam hal memenuhi kebutuhan siswa sudah cukup baik hanya saja belum dapat memenuhi kebutuhan seluruh siswa yang terbagi dari kelas I hingga VI di Sekolah ini.

Menurut beberapa wali murid menyebutkan pihak sekolah sebagai penerima BOS belum dapat memenuhi kebutuhan keseluruhan siswa tersebut karena dari segi kelengkapan dan penyediaan khususnya bahan pembelajaran masih kurang.

Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah di Sekolah Dasar Negeri 004 Tanjung Palas dari segi efektivitas sudah mulai sedikit efektif walaupun belum sepenuhnya hasil yang diharapkan program ini dapat terlaksana karena penyediaan yang kurang merata.

Pihak sekolah dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana BOS telah bersandar kepada aturan yang telah ditetapkan yaitu Petunjuk Teknis (JUKNIS) penggunaan dan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sekolah dapat terlebih dahulu memprioritaskan bahan ajar atau buku-buku pelajaran dari pada terus mendanai untuk infrastruktur sekolah didalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) karena kualitas sekolah tersebut berdasarkan kualitas siswa-siswa didalamnya.

Efisiensi

Tujuan dari program BOS bisa tercapai dibutuhkan juga usaha dari pihak sekolah tentunya, seperti memanfaatkan dana yang ada sebaik mungkin dan untuk hal-hal yang benar-benar dibutuhkan. Sekolah khususnya SD Negeri 004 Tanjung Palas dari segi mengefisienkan penggunaan sebelumnya disusun terlebih dahulu rencana kegiatan anggaran sekolah dengan menggunakan dana BOS agar lebih efisien dalam penggunaannya.

Penggunaan Dana BOS harus sesuai dengan petunjuk yang berlaku, dan selalu memperhatikan tingkat efisiensi alokasinya sesuai dengan apa yang sudah disusun dalam rencana penggunaan dana tersebut. Dari penyampaian tersebut dalam menjaga penggunaan dana tetap efisien atau sesuai dengan koridor penggunaannya pihak sekolah selalu harus berkoordinasi dengan tim BOS ditingkat daerah tepatnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan serta membuat Rencana Penggunaan Dana yang didasari pada kebutuhan dan pembiayaan kegiatan sekolah pada saat sebelum dana diluncurkan.

Pihak sekolah tidak bisa memaksakan penggunaan dana seperti yang diinginkan, kepala sekolah mengatakan dana ini sifatnya bantuan jadi sebagai penerima harus bisa menggunakan dengan bijak dan sesuai dengan peraturan yang tim BOS ajukan. Penganggaran per jenis kebutuhan tidak lebih dari 10.000.000, anggaran BOS juga menganggarkan bagian

pengembangan profesi guru dengan catatan masih menyangkut kebutuhan sekolah.

Upaya sekolah dalam membantu mengefisienkan dana BOS dilakukan dengan cara membuat sesuai kebutuhan sekolah RPD dan membuat sebenar-benarnya SPJ. Harapan peneliti pihak BOS dapat memperhatikan kategori yang diberikan agar pendanaan tidak habis dibagikan itu saja setiap dana tersebut cair, karena kebutuhan sekolah terkadang terdapat diluar kategori yang diberikan

Kecukupan

Kecukupan berkaitan dengan pencapaian hasil dari Program BOS tersebut fengan melihat bahwa program ini sudah berjalan selama kurang lebih 15 Tahun sejak awal mulai dilakukan, telah mengalami berberapa perubahan terkait pelaksanaannya.

Dana yang ada didalam program tersebut dapat digunakan sesuai dengan rencana penggunaan dana yang dibagi dalam beberapa pembagian yang dihitung berdasarkan (%) persen yaitu 30%, 50%, dan 20% sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan dalam juknis Program BOS tersebut. Program BOS diberlakukan dengan harapan Sekolah bisa memperbaiki dan memenuhi kebutuhannya sendiri, dan dapat mengurangi angka putus sekolah karena biaya pendidikan

Program BOS diberlakukan dengan harapan Sekolah bisa memperbaiki dan memenuhi kebutuhannya sendiri, dan dapat mengurangi angka putus sekolah karena biaya pendidikan.

Semua pembiayaan tidak hanya sekedar dibiayai tetapi juga harus jelas peruntukannya, pihak sekolah diharapkan harus transparansi dalam penggunaan dana yang diberikan. Sekolah secara tidak langsung maupun secara langsung selalu diawasi dari pihak Tim BOS dari Dinas Pendidikan atau yang biasa mereka sebut dengan Tim Verifikasi tersebut. Jadi dari segi kecukupan atau pencapaian hasil dari program ini sudah baik melihat tertibnya pihak sekolah dalam menggunakan dana dalam hal pelaporan penggunaan dana. Hal ini tentu saja memberikan

dampak baik terhadap efektivitas penggunaan dana operasional sekolah yang mana sekolah merasa terbantu dengan adanya kebijakan ini sehingga dapat memberikan hasil yang baik terhadap kelangsungan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 004 Tanjung Palas.

Kepala sekolah dalam penyampaiannya membenarkan bahwa dana yang diberikan oleh pemerintah cukup besar dan sangat berpengaruh pada siswa dan sekolah, tetapi karena kebutuhan sekolah tidak pernah sama pada semester dan triwulannya terkadang tetap ada penambahan dari bendahara sekolah.

Dana yang diberikan perhitungan berdasarkan siswa yang ada di sekolah yang digunakan untuk operasional sekolah dan kebutuhan siswa , dana yang diberikan terbilang besar namun belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan yang ada di sekolah. Terkadang dana tersedia tapi dalam aturan tidak bisa digunakan, jadi sekolah harus mandiri dengan mengandalkan dana dari luar BOS.

Kesimpulan dari hasil wawancara menggambarkan bahwa dana BOS sangat bermanfaat dalam operasional sekolah tapi jumlah anggaran dana BOS yang diterima sekolah dalam membiayai operasional sekolah dirasakan belum cukup atau memenuhi. Padahal dana yang diterima oleh sekolah cukup besar karena jumlah siswa yang semakin banyak setiap tahunnya, sehingga pihak sekolah harus mampu mengkofer kebutuhan yang perutukannya tidak ada didalam juknis penggunaan Dana BOS.

Pemerataan

Penyediaan bahan ajaran yaitu buku-buku panduan belajar untuk siswa karena beberapa siswa masih harus memperbanyak secara mandiri untuk bisa belajar dirumah dan sebagian lainnya mencari bahan ajaran dari internet. Hal ini patut menjadi bahan evaluasi bagi sekolah khususnya dalam melengkapi bahan ajaran tidak hanya meningkatkan dari segi infrastruktur saja.

Dapat disimpulkan dari beberapa pemaparan bahwa dari segi pemerataan penyediaan bantuan berupa buku pelajaran masih kurang seimbang yang dapat menggunakan karena sebagian siswa masih harus memenuhi kebutuhan belajarnya sendiri. Hal ini menjadi bahan evaluasi bagi pihak sekolah karena dalam pelaksanaan kebijakan dana BOS dari segi pemerataan masih belum optimal. Harapan peneliti agar penyediaan buku pelajaran disekolah harus lebih diperhatikan karena tujuan Dana BOS untuk dapat meringankan beban siswa terkait pembiayaan pendidikan namun kenyataan yang terjadi siswa tetap harus membiayai biaya pendidikannya.

Responsivitas

Program BOS yang sampai sekarang masih digunakan dan masih sangat berpengaruh bagi sekolah dalam menunjang kualitas pendidikan, sangat diharapkan akan terus menjadi program yang dapat meringankan beban siswa dan membantu pembiayaan sekolah agar terus dapat beroperasi demi kelancaran proses transfer ilmu pengetahuan. Program BOS sudah sangat memberikan kebermanfaatannya bagi dunia Pendidikan, dari sisi responsivitas sudah sangat baik dari pemberi hingga penerima dapat memuaskan dan membuat sekolah mengalami kemajuan dan sedikit demi sedikit dapat memenuhi kebutuhan sekolah.

Dari hasil wawancara, maka peneliti berpendapat bahwa aspek responsivitas telah terpenuhi dengan cukup baik. Hal ini dikarenakan pemerintah dan masyarakat merespon secara positif kebijakan dana BOS di sekolah yang dilakukan sehingga dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran, manfaat kebijakan dana BOS ini pun sudah dirasakan oleh sekolah penerima.

Wali murid turut merespon terkait program BOS, mengharapkan program ini dapat terus tersalurkan. Menyadari sekolah bisa mendapatkan pendanaan dari sumber lain seperti dana aspirasi dari dewan bahkan sponsor hanya dengan mengajukan proposalnya, tapi dana BOS tetap menjadi sumber kehidupan bagi sekolah

menurutnya ini luar biasa. Wali murid yang juga sebagai Lurah di tempat SD Negeri 004 tersebut dibangun ingin sekali mengalokasikan dana kelurahan ke sekolah namun belum mampu merealisasikan hal tersebut, sesekali melakukan kunjungan guna memberi dukungan pada sekolah.

Peneliti simpulkan dari hasil wawancara program ini dinilai baik karena kesesuaian baik pemberi maupun penerima bantuan sudah merasakan manfaat keberadaannya, Program BOS yang sampai sekarang masih digunakan dan masih sangat berpengaruh bagi sekolah dalam menunjang kualitas pendidikan, sangat diharapkan akan terus menjadi program yang dapat meringankan beban siswa dan membantu pembiayaan sekolah agar terus dapat beroperasi demi kelancaran proses transfer ilmu pengetahuan.

Ketepatan

Ketepatan, yaitu suatu hasil pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dilihat dari kesesuaian biaya dengan standar dan bentuk Surat Pertanggung Jawaban yang sesuai dengan ketentuan juknis.

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kelayakan (appropriateness) adalah kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substansif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut.

Penggunaan dana BOS, sangat perlu memperhatikan Juknis dan dapat dipertanggungjawabkan peruntukan dana tersebut digunakan. Pengelolaan dana BOS di sekolah dilakukan sesuai dengan juknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana BOS agar anggaran dapat tepat sasaran dalam pelaksanaan dan manfaatnya dapat

dirasakan tanpa melanggar aturan yang telah disusun.

Pernyataan ini disampaikan Kepala Sekolah SD Negeri 004 Tanjung Palas bahwa sekolah selalu mengacu pada petunjuk teknis dan aturan yang diberikan menurutnya sekecil apapun jika itu bantuan harus dipertanggung jawabkan. Beliau juga mengatakan dalam menjalankan hal tersebut sedikit rumit karena ada proses yang harus dilalui tetapi dibalik itu agar sekolah dapat hati-hati dalam penggunaan dana. Pihak sekolah dipersilahkan menyusun RPD (Rencana Penggunaan Dana) dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait pembuatan RPD sampai dengan pertanggungjawaban penggunaan dana.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa ketepatan sudah baik hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sudah sesuai dengan biaya dan standar yang ada dalam petunjuk teknis yang ada. Kemudian surat pertanggung jawaban yang dibuat selama ini juga sudah baik dan tidak pernah bermasalah sampai ke pengawas baik dari pihak Dinas pendidikan, Inspektorat maupun Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Pelaporan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Pelaporan penggunaan dana pada dasarnya sudah baik dan sesuai dengan system yang diberlakukan terkhusus SD Negeri 004 Tanjung Palas karena pelaporan penggunaan dana sudah sesuai dengan Juknis yang berlaku baik itu BOSDA maupun BOSNAS.

Demi kelancaran dan kelengkapan administrasi dari dana bantuan operasional sekolah yang harus dipenuhi sebagai wujud transparansi dan pertanggungjawaban setiap dana yang telah digunakan oleh sekolah, pelaporan dari penggunaan dana harus selalu diterbitkan saat dana selanjutnya akan dicairkan. Sekolah dituntut agar tepat waktu dalam penyampaian laporan ini karena masa penyusunan laporan dan penyusunan rencana penggunaan dana tidak berjarak jauh.

kepala sekolah dalam penggunaan dana dan yang berkaitan dengan mekanisme pelaporan penggunaan dana, setelah sekolah diberi kemudian dibelanjakan sesuai dengan perencanaan yang dilakukan setelah itu dibuat laporannya dalam arti pertanggung jawaban dari penggunaan tersebut lalu dilaksanakan cek kevalidan dan kebenaran SPJ yang telah dibuat berdasarkan ketentuan yang berlaku, jika ada yang kurang atau tidak sesuai diperbaiki dan jika sudah benar dipersilahkan menyusun Rencana penggunaan dana berikutnya.

Pelaporannya sendiri ada dua macam yaitu pelaporan online dan berbentuk SPJ ,terkait waktu tergantung jika itu BOSDA persemester jika itu BOSNAS pertriwulan. Harus benar-benar valid karena nama toko, stempel basah, sampai dengan gambar bersama pemilik toko ketika belanja itu harus kita cantumkan.

Dengan demikian berdasarkan hasil wawancara terkait pelaporan penggunaan dana BOS di SD Negeri 004 Tanjung Palas dapat dikatakan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan standar prosedur yang diberikan.

3. Pengawasan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah

Pengawasan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah di Sekolah Dasar Negeri 004 Tanjung Palas, sejauh ini sudah terlaksana dengan baik dan tepat sasaran serta dapat dipertanggung jawabkan kebenaran pelaporannya. Pengawasan penggunaan dana dapat dikatakan transparan karena mampu melibatkan banyak pihak yang berkompeten terkait alokasi dana BOS tersebut.

Pengawasan penggunaan dana di sekolah, sudah dilakukan dengan dua cara yaitu mengawasi dokumen RPD dan SPJ dari sekolah yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan selaku instansi daerah yang membidangi dan monitoring program BOS.

Pernyataan terkait pengawasan yang dikemukakan oleh Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan, selaku yang

membidangi ia menyatunya bahwa selalu dilakukan monitoring, baik dari pusat, provinsi dan kabupaten. Berkaitan dengan penggunaan dana pemeriksaan meliputi ada tidaknya barang yang sekolah anggarkan dalam RPD dan SPJ. Pengawasan atau audit yang dilakukan melibatkan banyak pihak tidak hanya dari Dinas Pendidikan selaku yang menaungi namun juga terlibat Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pengawasan tidak hanya dilakukan saat dilapangan namun konsultasi RPD dan yang lainnya juga termasuk dalam pengawasan pihak pemerintah.

Petugas penjaga sekolah di SD Negeri 004 Tanjung turut menyampaikan terkait proses pengawasan penggunaan dana BOS yang dilakukan meliputi dua pengawasan yaitu pengawasan yang dilakukan dalam bentuk pemeriksaan laporan pertanggung jawaban secara tertulis yang harus dilaporkan oleh sekolah dan pengawasan dengan melakukan kunjungan pihak pengawas dalam arti secara langsung melakukan klarifikasi atau verifikasi mengenai penggunaan dana BOS tersebut secara transparansi.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa pengawasan dari penggunaan dana BOS di SD Negeri 004 Tanjung Palas sejauh ini dapat dikategori kan baik. Karena pengawasannya menggunakan mekanisme yang berlaku dan mampu melibatkan banyak pihak sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Harapan kedepannya agar pengawasan tidak hanya dilakukan oleh pihak yang berkompeten dan yang membidangi namun seluruh elemen mampu melibatkan diri mengingat informasi untuk publik terbuka dan mudah sekali diakses kecuali yang bersifat rahasia sehingga jika terdapat ketidak sesuaian atau penyimpangan peraturan dan yang terjadi dilapangan bisa dengan segera dilaporkan kepada instansi pengawas.

PENUTUP

Simpulan

Simpulan Evaluasi Program Bantuan Operasional Sekolah di Sekolah Dasar Negeri 004 Tanjung Palas meliputi:

Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah. Dari segi efektivitas penggunaan dana BOS belum begitu efektif karena lebih banyak memaksimalkan pembangunan infrastruktur dan melengkapi peralatan penunjang sekolah daripada melengkapi bahan ajar siswa, sekolah seharusnya terlebih dahulu memprioritaskan buku panduan belajar karena hal tersebut lebih berpengaruh pada KBM siswa.

Dari segi efesiensi sudah baik terlihat bahwa sekolah mengupayakan untuk membantu mengefesiinkan dana dengan membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) agar dapat sebaik mungkin dalam menggunakan dana BOS untuk kegiatan sekolah sesuai dengan yang direncanakan.

Dari segi kecukupan sudah dapat dikategorikan baik, dana yang disalurkan sangat bermanfaat bagi Sekolah Dasar Negeri 004 Tanjung Palas. Namun dalam jumlah anggaran dana BOS yang diterima sekolah dalam membiayai operasional sekolah dirasakan belum cukup atau memenuhi. Terbatasnya pengalokasian dana BOS dalam pembiayaan operasional sekolah juga mempengaruhi pelaksanaan kebijakan dana BOS yang hanya difokuskan dengan yang ditetapkan pada aturan. Sehingga pihak sekolah turut memenuhi kebutuhan sekolah yang tidak diakomodir oleh dana BOS.

Dari segi pemerataan belum dapat dikatakan baik dan belum optimal diambil dari bantuan penyediaan bahan ajaran yaitu buku paket pelajaran untuk siswa masih sangat kurang karena hanya sebagian siswa yang dapat merasakannya dan sebagian lainnya harus dapat memenuhi bahan ajarnya secara mandiri.

Dari segi responsivitas dinilai baik dapat dilihat adanya program ini sangat membantu dan berpengaruh dalam memenuhi kebutuhan sekolah serta menunjang kualitas pendidikan baik akademik maupun non akademik demi kelancaran proses transfer ilmu pengetahuan.

Dari segi ketepatan juga sudah baik dapat dilihat dari pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sudah sesuai dengan biaya dan standar yang ada dalam petunjuk teknis yang ada. Kemudian surat pertanggung jawaban yang dibuat selama ini juga sudah baik dan tidak pernah bermasalah sampai ke pengawas baik

dari pihak Dinas pendidikan, Inspektorat maupun Badan Pemeriksa Keuangan.

Saran

Saran disusun berdasarkan temuan penelitian yang telah dibahas dan menjadi bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang terlibat dan bagi perbaikan program Bantuan Operasional Sekolah Di Sekolah Dasar Negeri 004 Tanjung Palas.

1. Hendaknya kepala sekolah mampu memahami kebutuhan sehingga emfaatan dana BOS benar-benar diarahkan untuk operasional sekolah yang menunjang kelancaran proses belajar.
2. Perlunya kajian atau penelitian selanjutnya yang lebih mendalam mengenai indikator evaluasi kebijakan yang lebih banyak atau yang berbeda dari penelitian ini supaya menghasilkan penelitian selanjutnya yang lebih luas.
3. Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar lebih merata sepenuhnya tidak terdapat kesenjangan dan perlu ada peningkatan dalam anggaran pembelian buku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel:

- Asnawi Prihatin Aulia 2013, *Evaluasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2012 (Studi Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Kabupaten Bintan)*, Naskah Publikasi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Maritim Raja Haji Tanjung Pinang <http://skripsi%2012penelitian/naspubaulia080563201004-2013.pdf> diakses pada hari Minggu 13 Oktober, Pukul 13.30 Wita
- Fajrin Nurul Aziz 2018, *Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Mts Negeri 1 Rakit Kabupaten Banjarnegara*, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Institut

Agama Islam negeri purwokerto <http://aziznurulfajrin.blogspot.com/journalbos.html/m:1> diakses pada hari Minggu 13 Oktober 2019, Pukul 13.22 Wita.

Husein Turizal Muh 2013, *Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Upaya Mengurangi Angka Putus Sekolah*, Jurnal Fakultas Agama Islam dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang Vol. 13 No. 1

<http://rausyanfikir.agamaislamdankeguruan/1979.0074iisn.pdf> diakses pada hari Senin 14 Oktober, Pukul 22.21 Wita

Karding Kadir Abdul 2008, *Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kota Semarang*. Administrasi Publik Universitas Diponegoro Semarang

Mamonto Samuel 2010, *Evaluasi Program Bantuan Dana Operasional Sekolah Pada Sekolah Dasar Nurul Huda Ii Yapis Jayapura*, Jurnal Dosen Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Yapis Papua <http://igilib.ipdn.ac.id> diakses pada hari Minggu 13 Oktober 2019, Pukul 01.09 Wita

Nugroho Riant. *Public Policy*. 2014. Edisi Lima. Jakarta: Penerbit PT. Elex Media Komputindo Purnomo Sucipto Hadi 2005 BOS Pendidikan Gratis Rakyat Apatis Artikel Suara Merdeka <http://www.&suaramerdeka.com> diakses pada hari Kamis 17 Oktober 2019, Pukul 22.12 Wita

Muazansyah Imam dan Irsyad Sudirman. 2020. *Implementation of Community Development and Empowerment at PT Pesona Khatulistiwa Nusantara*. Dia: Jurnal ilmu administrasi publik. Program Studi Doktor Ilmu Administrasi, Unversitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Satoto 2008 *Dana BOS Turunkan Angka Putus Sekolah* Artikel <http://imadebtg-sdsmp.b.blogspot.com> diakses pada hari Kamis 17 Oktober 2019 Pukul 22.30 Wita

Wibawa, Samodra, dkk. 1994. *Evaluasi Keijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Medpress.

Peraturan :

Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan Menteri pendidikan nasional nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009.